

RINGKASAN

Di era modern seperti sekarang ini banyak hal memerlukan digitalisasi. Dalam tatanan pemerintahan, digitalisasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh seluruh Indonesia dengan tujuan dapat mempermudah dalam proses tatanan pemerintahan. SIPD ini dapat digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RKA, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Namun pada proses implementasi kebijakan SIPD ini masih terdapat beberapa permasalahan sehingga implementasi SIPD ini dapat dikatakan belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Ciamis pada Tahapan Perencanaan dan Penganggaran, dan untuk menganalisis pegawai pemerintah daerah dalam melihat manfaat dan hambatan pada penggunaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Warwick yang menyebutkan empat aspek penting seperti kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Sasaran penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta OPD pelaksana kebijakan SIPD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dengan Bappeda sebagai *leading sector* tahapan perencanaan dan BPKD sebagai *leading sector* tahapan penganggaran dapat dikatakan baik. Kemampuan organisasi dalam mengelola organisasi pada implementasi kebijakan SIPD ini sudah baik, pimpinan sudah baik dalam mengkoordinasikan kepada internal dan OPD. Informasi yang disampaikan dari pusat telah tersampaikan dengan baik kepada OPD oleh *leading sector*, selain itu faktor dukungan dalam proses implementasi kebijakan ini dapat membantu keberhasilan kebijakan, dan pembagian potensi yang dilakukan pimpinan sudah dikatakan baik. Namun dalam implementasi kebijakan ini masih banyak hambatan, *error system* menjadi suatu kendala yang sering terjadi sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penginputan, selain itu keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menjadi suatu permasalahan utama dalam implementasi kebijakan SIPD ini, selain itu untuk transparansi nya pun belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, penganggaran, perencanaan, SIPD.

SUMMARY

In the modern era like today, many things require digitalization. In the governance system, digitalization is used to improve the quality of public services. The Regional Government System created by the Ministry of Home Affairs is an application used by all of Indonesia with the aim of facilitating the governance process. This SIPD can be used in the process of preparing development planning documents such as RKA, RKPD, RPJMD, and RPJPD. However, in the process of implementing this SIPD policy, there are still several problems so that the implementation of this SIPD can be said to be less than optimal.

This study aims to describe the implementation of the policy of the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning the Regional Government Information System (SIPD) in Ciamis Regency at the Planning and Budgeting Stages, and to analyze local government employees in seeing the benefits and obstacles to using SIPD in the planning and budgeting process.

This study uses Warwick's Policy Implementation theory which mentions four important aspects such as organizational capacity, information, support, and potential distribution. The research method used is a qualitative method through interviews, observations, and documentation. The informant selection technique in this study is the purposive sampling technique. The target of this research is the Regional Development Planning Agency, and OPD implementing the SIPD policy.

Based on the results of research conducted in Ciamis Regency with Bappeda as the leading sector of the planning stage and BPKD as the leading sector of the budgeting stage, it can be said to be good. The ability of the organization in managing the organization in the implementation of this SIPD policy is good, the leadership is good at coordinating with internal and OPD. Information conveyed from the center has been conveyed well to OPD by the leading sector, in addition, the support factor in the process of implementing this policy can help the success of the policy, and the distribution of potential carried out by the leadership has been said to be good. However, in the implementation of this policy there are still many obstacles, system errors are a frequent obstacle that can cause delays in input, in addition, the limited quality of human resources is also a major problem in the implementation of this SIPD policy, in addition, its transparency is not yet fully optimal.

Keywords: Budgeting, planning, policy implementation, SIPD.